

ANALISIS KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PESISIR KECAMATAN SIBOLGA SELATAN KOTA SIBOLGA

Azizah Mahary¹, Bayu Guntoro Priyatna¹

Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian Universitas Asahan

e-mail: azizah.mahary@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir, meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi mata pencaharian, tingkat pendidikan, akses terhadap layanan dasar, serta tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode survei lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan responden yang dipilih secara purposive, yakni masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan berprofesi sebagai nelayan. Selain itu, observasi langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi di kawasan pesisir juga dilakukan untuk melengkapi data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai distribusi sosial ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat pesisir di Kecamatan Sibolga Selatan memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dengan ketergantungan yang tinggi terhadap sektor perikanan sebagai sumber pendapatan utama. Masyarakat pesisir juga menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar seperti air bersih dan listrik. Penelitian ini menyarankan perlunya intervensi pemerintah dalam bentuk pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kecamatan Sibolga Selatan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kecamatan Sibolga Selatan, yang terletak di Kota Sibolga, merupakan salah satu kawasan pesisir yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan. Sebagian besar masyarakat di daerah ini berprofesi sebagai nelayan, baik sebagai pemilik kapal, buruh nelayan, maupun pedagang hasil laut. Kehidupan masyarakat pesisir umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, terutama laut dan cuaca yang tidak menentu. Kecamatan Sibolga Selatan merupakan salah satu Kecamatan di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 4 Kelurahan. Luas wilayah Kecamatan Sibolga Selatan sebesar 3,14 Km² dan rentang tinggi diatas permukaan laut diantara 0-29 m, dengan jumlah penduduk sebanyak 36,838 Jiwa yang terdiri atas 18.439 jiwa penduduk laki-laki dan 17.879 jiwa penduduk perempuan, kepadatan penduduk di Kecamatan Sibolga Selatan sebesar 10.772,93 per km² (BPS Sibolga. 2024). Masyarakat pesisir Kecamatan Sibolga Selatan mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Posisi Pajak Bumi dan Bangunan yang telah terealisasi di Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp. 326.460.026 dengan persentase realisasi secara rata-rata sebesar 85,10 % (BPS Sibolga. 2024). Sumber ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Sibolga Selatan sudah cukup baik. Tapi masih ada beberapa masyarakat pesisir Kecamatan Sibolga Selatan masih menengah ke bawah, karena masyarakat yang cenderung konsumtif dan boros

Sektor perikanan, meskipun memberikan potensi ekonomi yang besar, juga menghadapi tantangan yang dapat memengaruhi keberlanjutan hidup masyarakat pesisir. Menurut Wati (2017), masyarakat pesisir sering kali menghadapi masalah sosial ekonomi yang dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Hal ini menjadikan masyarakat pesisir lebih bergantung pada mata pencaharian tradisional seperti perikanan, tanpa adanya diversifikasi ekonomi yang cukup. Di sisi lain, Kurniawan (2020), menyatakan bahwa rendahnya pendidikan di kalangan masyarakat pesisir berhubungan langsung dengan terbatasnya kesempatan kerja di luar sektor perikanan, yang menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain pendidikan, akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, air bersih, dan infrastruktur yang memadai juga menjadi tantangan besar. Menurut penelitian oleh Setiawan dan Sari (2019), masyarakat pesisir di daerah tertentu sering kali terpinggirkan dalam hal pembangunan infrastruktur. Kurangnya akses ini memperburuk kondisi sosial ekonomi mereka, di mana masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

Berkaitan dengan sektor perikanan, Syamsuddin (2018) mengungkapkan bahwa ketergantungan pada perikanan juga memiliki dampak buruk terhadap stabilitas ekonomi masyarakat pesisir, karena hasil tangkapan yang bergantung pada musim dan cuaca. Sementara itu, Agustin (2021) menambahkan bahwa keberlanjutan sektor perikanan harus diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan keterampilan dan diversifikasi mata pencaharian, agar masyarakat pesisir tidak terjebak dalam ketergantungan yang tinggi pada satu sektor ekonomi. Kondisi sosial ekonomi yang belum sepenuhnya berkembang ini memerlukan perhatian lebih lanjut, baik dari pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali

lebih dalam mengenai karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Sibolga Selatan, dengan fokus pada aspek pendidikan, pendapatan, mata pencaharian, serta akses terhadap layanan dasar.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir merujuk pada kelompok manusia yang tinggal di sepanjang garis pantai dan bergantung pada sumber daya laut serta ekosistem pesisir untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka umumnya memiliki keterikatan kuat dengan laut dan perikanan sebagai sumber utama penghidupan. Menurut Damanik (2014), masyarakat pesisir dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu masyarakat yang sepenuhnya bergantung pada hasil laut dan masyarakat yang menggabungkan perikanan dengan kegiatan ekonomi lainnya seperti pertanian atau perdagangan. Masyarakat pesisir umumnya memiliki ciri khas yang dipengaruhi oleh keterbatasan akses ke sumber daya ekonomi dan infrastruktur yang memadai. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir sering kali bergantung pada perikanan sebagai mata pencaharian utama. Setiawan dan Sari (2019) menyatakan bahwa pendapatan masyarakat pesisir sangat bergantung pada hasil tangkapan laut yang dipengaruhi oleh faktor alam, sehingga tidak jarang terjadi fluktuasi pendapatan yang tajam. Masyarakat pesisir seringkali menghadapi kesulitan ekonomi karena ketidakstabilan hasil tangkapan ikan dan perubahan iklim yang berdampak pada keberlanjutan usaha perikanan.

Masyarakat pesisir seringkali memiliki struktur sosial yang berbeda dengan masyarakat di daerah pedalaman. Mereka cenderung memiliki keterikatan yang lebih erat dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Interaksi sosial di komunitas pesisir biasanya bersifat lebih kolektif dan berbasis pada hubungan kekeluargaan serta gotong royong. Menurut Sihombing (2017), faktor sosial dalam masyarakat pesisir seperti nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan norma yang berkembang memainkan peran penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Tradisi dan budaya lokal sangat mempengaruhi cara hidup mereka, termasuk dalam cara mereka mengelola sumber daya alam.

2. Pendidikan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia di Masyarakat Pesisir

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir. Menurut Nurliani (2017), pendidikan memiliki peran penting dalam membuka peluang ekonomi, meningkatkan keterampilan, dan memperbaiki kesejahteraan sosial masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir, yang sering kali berada di daerah terpencil, menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Hal ini disebabkan oleh faktor geografis, keterbatasan fasilitas pendidikan, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Berdasarkan penelitian oleh Putra (2019), akses terhadap pendidikan di daerah pesisir umumnya terbatas, dengan sedikitnya jumlah sekolah atau fasilitas pendidikan yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan anak-anak di

daerah pesisir sering kali tidak menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah, yang berdampak pada rendahnya tingkat literasi dan keterampilan di kalangan generasi muda.

Tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat pesisir. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan akses ke fasilitas pendidikan yang memadai di daerah pesisir. Menurut Kurniawan (2020), rendahnya tingkat pendidikan menghambat perkembangan masyarakat pesisir dalam mengakses peluang ekonomi yang lebih luas. Sebagian besar penduduk pesisir terjebak dalam sektor tradisional dengan keterampilan yang terbatas. Oleh karena itu, pendidikan menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kawasan pesisir.

3. Akses Terhadap Infrastruktur Dasar di Masyarakat Pesisir

Infrastruktur dasar mencakup berbagai fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, sanitasi, dan fasilitas kesehatan. Akses yang baik terhadap infrastruktur dasar dapat meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan peluang ekonomi, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Di daerah pesisir, infrastruktur dasar sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi berbasis perikanan, pertanian, dan pariwisata, serta mengatasi tantangan alam dan geografis yang sering terjadi di wilayah tersebut (Yusuf, 2019).

Infrastruktur yang terbatas sering kali menjadi masalah besar di daerah pesisir. Menurut Wati (2017), kurangnya akses terhadap infrastruktur seperti air bersih, listrik, jalan, dan fasilitas kesehatan menjadi hambatan bagi masyarakat pesisir untuk hidup dengan standar kualitas hidup yang lebih tinggi. Selain itu, infrastruktur yang buruk juga mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ketika infrastruktur tidak memadai, masyarakat pesisir terpaksa menghadapi ketidaknyamanan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang pada gilirannya memperburuk kondisi sosial ekonomi mereka.

Menurut Kusuma (2020), akses terhadap jalan yang baik dan transportasi yang lancar juga sering menjadi masalah utama di masyarakat pesisir. Jalan yang rusak atau tidak memadai menghambat distribusi barang, termasuk hasil perikanan, sehingga mempengaruhi perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, terbatasnya akses ke fasilitas kesehatan juga menjadi isu penting, karena hal ini dapat menghambat penanganan medis yang cepat dalam keadaan darurat.

4. Ketergantungan pada Sektor Perikanan dan Dampaknya Terhadap Ekonomi

Masyarakat pesisir di banyak wilayah dunia, termasuk di Indonesia, sangat bergantung pada sektor perikanan sebagai sumber utama penghidupan. Ketergantungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari mata pencaharian, penyediaan pangan, hingga stabilitas sosial dan ekonomi. Menurut Sihombing (2019), sektor perikanan menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar

penduduk pesisir, baik sebagai nelayan, pengolah ikan, atau pedagang hasil laut. Masyarakat pesisir seringkali menjadikan perikanan sebagai satu-satunya atau utama sumber pendapatan mereka, yang menjadikan mereka sangat rentan terhadap perubahan kondisi alam dan ekonomi global yang memengaruhi sektor ini.

Sektor perikanan memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia, yang dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Sejak lama, perikanan telah menjadi sektor yang mendominasi perekonomian lokal di daerah pesisir. Menurut Taufik (2017), sektor ini menyumbang banyak pendapatan bagi keluarga-keluarga pesisir, namun ketergantungan yang tinggi pada perikanan juga mengandung berbagai risiko terkait dengan keberlanjutan sektor ini.

Ketergantungan pada sektor perikanan merupakan ciri khas yang paling mencolok dalam kehidupan masyarakat pesisir. Syamsuddin (2018) mengungkapkan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap perikanan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi masyarakat pesisir. Karena hasil tangkapan sangat dipengaruhi oleh faktor alam, musim, dan cuaca, fluktuasi pendapatan yang terjadi seringkali sulit untuk diprediksi. Agustin (2021) juga menyoroti pentingnya diversifikasi mata pencaharian bagi masyarakat pesisir, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada satu sektor yang rentan terhadap perubahan. Pengembangan keterampilan baru dan sektor usaha alternatif sangat diperlukan untuk mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap perikanan.

5. Kebijakan Pembangunan untuk Masyarakat Pesisir

Kebijakan pembangunan untuk masyarakat pesisir adalah serangkaian strategi, aturan, dan program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pesisir, meningkatkan kualitas hidup mereka, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di Indonesia, kebijakan ini sering mencakup aspek pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal (Sumarto, 2018).

Pembangunan daerah pesisir memerlukan pendekatan yang khusus karena wilayah ini sering menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan daerah perkotaan atau pedesaan. Hal ini termasuk kerentanannya terhadap perubahan iklim, bencana alam, dan degradasi lingkungan, serta ketergantungan masyarakat pesisir pada sektor perikanan yang rentan terhadap fluktuasi pasar dan kerusakan ekosistem laut (Sihombing, 2020).

Berbagai kebijakan pembangunan telah diperkenalkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Fauzi (2019) menekankan bahwa kebijakan yang efektif harus mencakup pemberdayaan ekonomi dan penguatan infrastruktur di daerah pesisir. Program-program yang dirancang untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesehatan serta pelatihan keterampilan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir. Di sisi lain, pendekatan berbasis partisipasi masyarakat

yang mengutamakan keterlibatan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan akan meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan tersebut.

6. Tantangan Sosial dan Ekonomi di Daerah Pesisir

Daerah pesisir di Indonesia, yang merupakan negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang, memiliki tantangan sosial dan ekonomi yang unik. Masyarakat pesisir cenderung memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam, terutama hasil laut, serta memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang seringkali berbeda dengan daerah perkotaan atau pedesaan lainnya. Meski memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, masyarakat pesisir seringkali menghadapi berbagai kendala dalam upaya meningkatkan kualitas hidup mereka. Tantangan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi mencakup kemiskinan, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, dan kerentanannya terhadap perubahan lingkungan dan iklim (Harahap, 2019).

Selain masalah ekonomi dan pendidikan, masyarakat pesisir juga menghadapi tantangan sosial yang cukup kompleks. Menurut Hadi (2020), ketidakpastian dalam sektor perikanan dapat menyebabkan ketegangan sosial, karena penduduk pesisir merasa kurang dihargai dan terpinggirkan dalam proses pembangunan yang lebih luas. Hal ini menyebabkan peningkatan angka kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dalam membangun kesejahteraan masyarakat pesisir.

7. Pemberdayaan Ekonomi dan Diversifikasi Mata Pencaharian

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan diversifikasi mata pencaharian merupakan dua aspek yang saling terkait dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah pesisir. Masyarakat pesisir yang umumnya bergantung pada sektor perikanan menghadapi berbagai tantangan, seperti fluktuasi hasil tangkapan, kerusakan lingkungan, dan bencana alam. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi yang melibatkan diversifikasi mata pencaharian menjadi penting untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap sektor tertentu yang rentan (Fahmi, 2018).

Pemberdayaan ekonomi di kawasan pesisir sangat diperlukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sektor perikanan. Diversifikasi mata pencaharian menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Menurut Sudarmaji (2021), program pemberdayaan yang melibatkan pelatihan keterampilan dan usaha kecil dapat membantu masyarakat pesisir untuk membangun ketahanan ekonomi yang lebih kuat. Usaha-usaha kecil dalam sektor pariwisata berbasis alam, kerajinan tangan, dan produk lokal dapat menjadi alternatif yang mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.

METODE PENELITIAN

Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 November 2024 yang berlokasi di Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survey kuisioner menggunakan google form, observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan informasi mengenai karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui daftar kuesioner yang disiapkan untuk nelayan, sedangkan data sekunder diperoleh dari kantor Kecamatan, dan instansi pemerintah yang terkait.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir Kecamatan Sibolga Selatan yang terdiri dari 4 Kelurahan yaitu Aek Habil, Aek Manis, Aek Parombunan, Aek Muara Pinang. Pemilihan kelurahan sebagai objek penelitian adalah secara *purposive* sampling (sengaja) dengan pertimbangan lokasi yang memiliki wilayah pesisir. Dalam pengambilan sampel *purposive* digunakan untuk memilih lokasi di Kecamatan Sibolga Selatan yang memiliki pesisir dan juga terdapat masyarakat yang bermukim di pesisir. Hasil prasurevei menunjukkan bahwa Kelurahan Aek Parombunan memiliki jumlah populasi terbanyak diikuti oleh Kelurahan Aek Manis dan Aek Habil Serta Aek Muara Pinang. Target Jumlah sampel sebanyak 50 responden (KK) diambil secara proporsional sebagai berikut: Kelurahan Aek Parombunan 20 KK, Aek Manis 20 KK, Kelurahan Aek Habil 5 KK dan Kelurahan Aek Muara Pinang 5 KK

HASIL

Deskripsi Wilayah Penelitian

1) Pembentukan Kecamatan Sibolga Selatan

Kecamatan Sibolga Selatan merupakan salah satu dari empat Kecamatan yang ada di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara. Pembagian kecamatan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 4 Tahun 2001.

2) Letak Geografis

Secara geografis batas wilayah kecamatan sibolga selatan yaitu : sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tapan Nauli sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sibolga Sambas, secara astronomis Kecamatan Sibolga Selatan terletak diantara $01^{\circ} 43' - 01^{\circ} 44'$ Lintang Utara dan antara $98^{\circ} 47' - 98^{\circ} 48'$ Bujur Timur

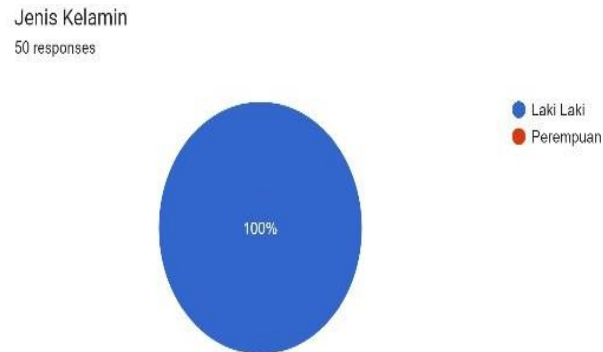
3) Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Sibolga Selatan lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, yakni 18.439 orang laki-laki dan 17.879 orang perempuan. Kelurahan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Kelurahan Aek Parombunan yaitu 11.749 orang, sedangkan Kelurahan Aek

Muara Pinanglah dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 5.981 orang.

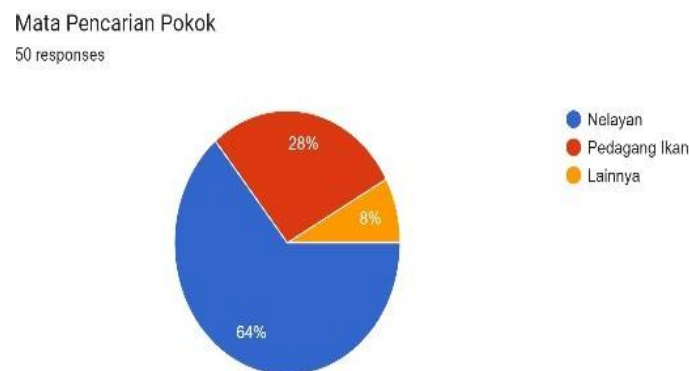
Karakteristik Responden

1) Jenis Kelamin



Responden dengan jenis kelamin laki- laki sebanyak 100% dan perempuan 0%. Namun, untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari wanita juga ikut mencari nafkah sebagai tambahan penghasilan keluarga. Pada umumnya wanita keluarga nelayan melakukan kegiatan lain yang dapat mendatangkan penghasilan tambahan, seperti menjual bahan-bahan sembako diwarung, menjual makanan (Nugra- heni *et al.*, 2012).

2) Mata pencarian pokok



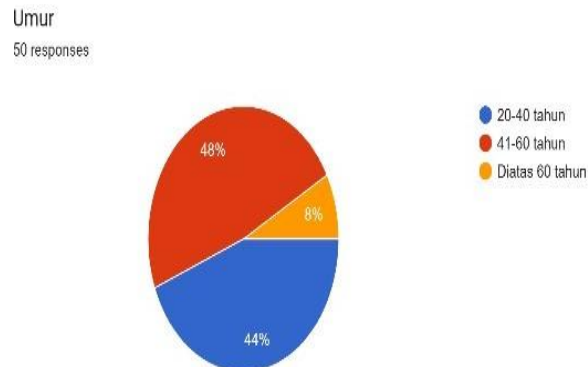
Berdasarkan kuesioner dari 50 responden diketahui masyarakat pesisir yang bermata pencarian pokok sebagai nelayan sebanyak 64%, *Pedagang Ikan* sebanyak 28%, lainnya 8%. Lainnya ini adalah responden yang bermata pencarian pokok dengan pekerjaan sampingan sebagai buruh kasar, bengkel, nelayan dan warung. Hal ini didukung oleh penelitian Nurhalimah (2019) masyarakat pesisir pada umumnya sebagian besar bermata pencaharian di sektor pemanfaatan sumber daya kelautan (marine resource based).

3) Karakteristik Sosial Masyarakat Pesisir

Karakteristik sosial masyarakat pesisir dapat dilihat dari umur, jumlah

anggota keluarga, tingkat pendidikan, lama domisili, status kepemilikan rumah dan jenis bangunan, kondisi kesehatan, dan kondisi lingkungan.

➤ Umur



Responden di Kecamatan Sibolga Selatan yang tergolong usia produktif sebanyak 44% yang berumur 20-40 tahun, sedangkan yang berusia 41-60 tahun sebanyak 48% dan 8% responden berusia lebih dari 60 tahun. Menurut Dilla *et al.*, (2017) umur mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kerja pada jenis pekerjaan yang mengandalkan tenaga fisik.

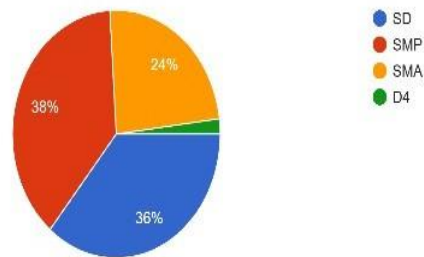
➤ Jumlah Anggota Keluarga



Sebanyak 42% keluarga beranggotakan 1-2 orang, 40% keluarga beranggotakan 3-4 orang, dan 18% beranggotakan 5-6 orang. Hal ini sejalan dengan penelitian Yudo dan Hernan- insih (2006) masyarakat pesisir mempunyai anak kurang dari tiga orang yang berarti ang- gota keluarganya sebagian bear terdiri dari 3-4 anggota keluarga. Fatmasari (2016) kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota keluarga rumah tangga merupakan salah satu dari strategi adaptasi yang harus ditempuh un- tuk menjaga kelangsungan hidup mereka.

➤ Tingkat Pendidikan

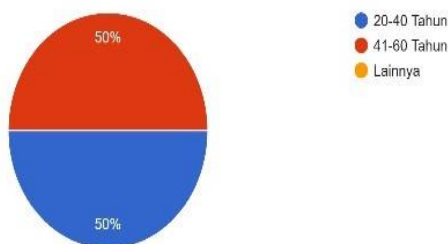
Tingkat Pendidikan
50 responses



Responden yang berpendidikan sampai sekolah dasar (SD) adalah 36%, sebanyak 38% berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP), sebanyak 24% berpendidikan hingga sekolah menengah atas (SMA) dan 2% menempuh pendidikan hingga diploma empat (D4). Menurut Yunita *et al.*, (2018) nelayan atau masyarakat pesisir menganggap pendidikan tidak memiliki peran yang penting bagi profesi mereka. Keseluruhan proses tersebut memiliki arti penting dan menentukan, karena sementara tatanan lama dipertahankan, tatanan baru yang terkadang berbeda sama sekali mulai muncul (Kurniawan. 2016).

➤ Lama domisili

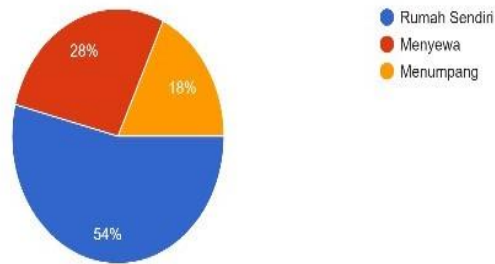
Lama Domisili
50 responses



Hasil penelitian 50% responden telah berdomisili di Kecamatan Sibolga Selatan selama 20-40 tahun. Sebagian besar responden telah berdomisili selama 41-60 tahun yaitu sebanyak 50% dan sebanyak 0% telah berdomisili lebih dari 61 tahun, lainnya sebanyak 8% (Lainnya ini adalah responden yang sudah lupa lama domisili karena faktor usia).

➤ Status kepemilikan dan jenis bangunan

Kondisi Rumah
50 responses

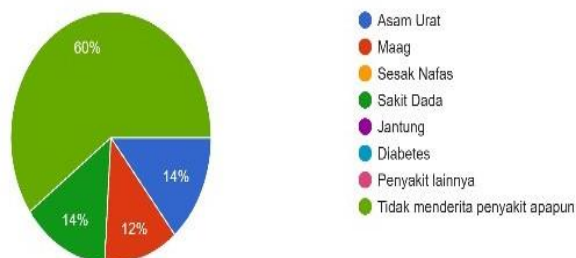


Kondisi fisik bangunan atau rumah masyarakat pesisir. Ada tiga jenis status kepemilikan rumah masyarakat pesisir, milik sendiri, sewa dan menumpang di keluarganya. Dan ada juga empat jenis bangunan rumah yaitu permanen, semi permanen, kayu / papan, dan gubuk. Sebanyak 54% responden memiliki rumah sendiri, 28% menyewa rumah untuk tinggal dan 18% lainnya tinggal menumpang di rumah keluarga inti. Sosial ekonomi responden kita bisa lihat dari jenis bangunan rumahnya dan status kepemilikan. Dari status kepemilikan milik sendiri dengan jenis bangunan permanen ada 9, semi permanen 6, kayu/papan 11, gubuk 7. Dari status kepemilikan sewa dengan jenis bangunan permanen tidak ada, semi permanen 4, kayu / papan 6 dan tidak ada responden yang menyewah digubuk. Dari status kepemilikan menumpang dengan jenis bangunan permanen 1, semi permanen 2, kayu/ papan 3, gubuk 1. Dalam segi status kepemilikan rumah masih ada beberapa sosial ekonomi masyarakat pesisir masih cenderung rendah karena walaupun milik sendiri tapi jenis bangunannya masih ada gubuk 7.

Kondisi Kesehatan

1) Jenis Penyakit

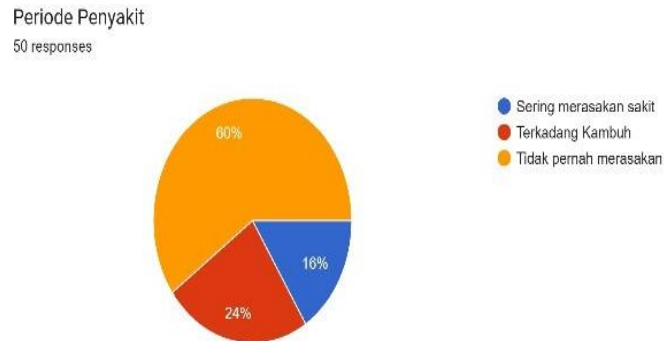
Kondisi Kesehatan/Penyakit
50 responses



Karakteristik responden berdasarkan kondisi kesehatan mulai dari jenis penyakit. Seperti halnya penyakit pada umum yang biasa diderita responden adalah asam urat yaitu sebanyak 14%, 12% menderita maag dan 14% menderita

sakit dada. Sebanyak 60% responden tidak menderita penyakit apapun.

2) Periode Penyakit



Karakteristik responden berdasarkan kondisi kesehatan mulai dari Periode penyakit. Yang sering merasakan sakit ada 16% 8 responden, masyarakat yang hanya merasakan kadang-kadang (jika kambuh) ada 24% 12 responden, dan yang tidak pernah merasakan sakit ada 60% 30 responden.

Kondisi Lingkungan

1) Sumber Air Bersih

Sebanyak 48% responden memperoleh air bersih dari PAM, 24% lainnya dari sumur galian dan 28% memperoleh air bersih dari keduanya. Sahwilaksa dan Kustini (2014) menyatakan bahwa air tanah merupakan sumber air tawar terbesar di bumi, mencakup air tawar atau 10,5 juta Km³. Air tanah sering diambil, baik untuk sumber air bersih maupun untuk iri- gasi, melalui sumur terbuka, sumur bor, bagi masyarakat pesisir yang bertempat tinggal di dekat pantai. Sumber air merupakan salah satu yang harus tersedia sepanjang waktu demi kelangsungan kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir Yudo dan Hernaningsih (2006).

2) Pembuangan sampah

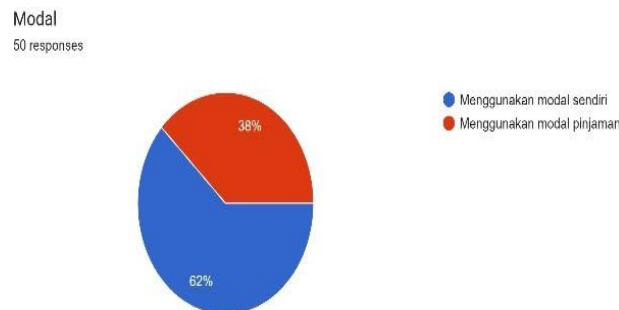


Sebanyak 26% responden membakar sampah rumah tangganya dan 50% membuang sampah di bak mobil sampah yang disediakan pemerintah, dan lainnya 22% yaitu responden yang membakar sampah dan membuang sampah ke mobil yang disediakan pemerintah. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan sampah dan limbah sudah baik karena

tidak ada responden yang membuang sampah dan limbah sembarangan.

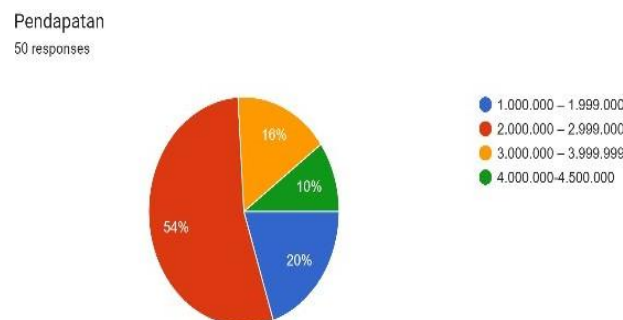
Karakteristik Ekonomi Masyarakat Pesisir

1) Modal



Modal dapat bersumber dari manapun baik dipinjam maupun modal sendiri. Sebagian besar responden yaitu 60% mengolah usahanya menggunakan modal sendiri dan 40% menggunakan modal pinjaman untuk menjalankan usahanya.

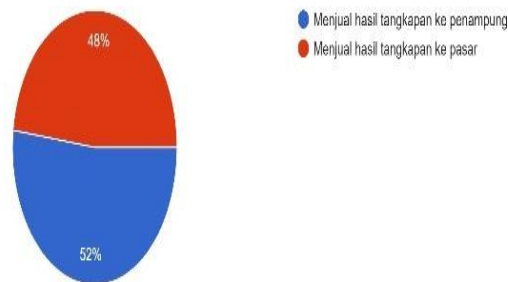
2) Pendapatan



Pendapatan bulanan responden mulai dari 10 responden dengan presentase 20% berada pada pendapatan bulanan Rp. 1.000.000 – Rp.1.999.000, 27 responden dengan presentase 54% berada pada pendapatan Rp.2.000.000 – Rp.2.999.000, 8 responden berada pada pendapatan 3.000.000 – 3.999.999 dan 5 responden berada pada pendapatan Rp.4.000.000-Rp.4.500.000. Tingkat pendapatan responden di Kecamatan Sibolga Selatan termasuk sudah sangat baik. Kondisi pendapatan responden tergantung dari jenis pekerjaan yang digeluti (Pinto. 2015). Menurut Muflikhati et al., (2010) Pendapatan nelayan sangat tergantung pada banyaknya hasil tangkapan yang sangat berfluktuasi sesuai dengan musim. Untuk sekarang nelayan sudah lebih pandai karena mereka sudah mempunyai pekerjaan sampingan.

3) Pemasaran

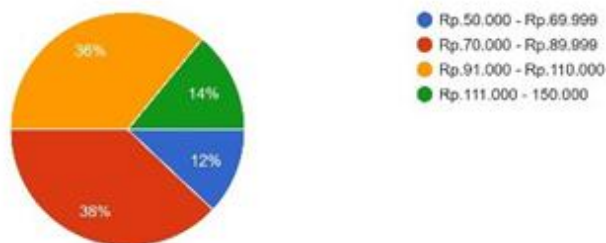
Pemasaran
50 responses



Berdasarkan data penelitian, 52% responden menjual hasil tangkapannya kepada penampung, dan 48% menjual hasil tangkapannya ke pasar. Jika hasil tangkapan dalam jumlah sedikit, pada umumnya responden menjual hasil tangkapannya kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggal responden. Sebaliknya, jika hasil tangkapan dalam jumlah yang cukup banyak, responden lebih memilih menjualnya ke pengumpul karena lebih efektif dan efisien. Menurut Nuriati (2019) ketika nelayan memperoleh hasil tangkapan dalam jumlah banyak, biasanya nelayan menjual ke pemborong atau pengecer kemudian ke konsumen akhir.

4) Upah Harian

Upah Harian
50 responses



Upah harian mulai dari kisaran Rp.50.000 hingga Rp.150.000. Responden dengan tingkat upah harian Rp.50.000 sampai Rp.69.999 sebanyak 12%, upah Rp.70.000 sampai Rp.89.999 sebanyak 38% responden, upah Rp.91.000 sampai Rp.110.000 sebanyak 36% dan 14% berupah harian Rp.111.000 sampai 150.000. Upah harian dalam 50 responden ini sudah sangat baik. Karena pendapatannya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pesisir merupakan pertemuan antara darat dan laut. Karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir di Kecamatan Sibolga Selatan yaitu sebagian besar bermata pencarian sebagai nelayan. Dari segi pendidikan masyarakat pesisir 74 persen masih berpendidikan SD dan SMP. Kondisi air bersih dan lingkungan masyarakat pesisir sudah baik karena masyarakat memiliki akses yang mudah untuk air bersih. Masyarakat pesisir sangat memperhatikan penanganan limbah dan sampah sehingga lingkungan tempat tinggal tidak tercemar. Ekonomi masyarakat pesisir cukup baik dengan status kepemilikan rumah sendiri 64 persen dan rata-rata pendapatan perbulan diatas Rp.3.000.000 sampai Rp.4.500.000 sebanyak 26 persen.

Saran

Penelitian lanjutan tentang kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pesisir di Kecamatan Sibolga Selatan

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2024. Kecamatan Sibolga Selatan Dalam Angka Tahun 2024. Kota Sibolga.
- Damanik, J. (2014). Masyarakat Pesisir: Keanekaragaman Sosial dan Ekonomi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Fahmi, D. (2018). Pemberdayaan Ekonomi dan Diversifikasi Mata Pencarian di Daerah Pesisir. Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga.
- Fatmasari, D. (2016). Analisis Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(1).
- Harahap, S. (2019). Tantangan Sosial dan Ekonomi di Daerah Pesisir. Yogyakarta:
- Kusnadi. 2009. Keberdayaan Nelayan Dalam Dinamika Ekonomi Pesisir. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Sihombing, A. (2017). Struktur Sosial Masyarakat Pesisir: Antara Budaya dan Ekonomi. Medan: Penerbit Universitas Sumatera Utara.
- Kusuma, D. (2020). Akses Infrastruktur dan Perekonomian Masyarakat Pesisir. Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga.
- Nurliani, R. (2017). Pendidikan di Masyarakat Pesisir: Tantangan dan Peluang. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Novrizal, Z.W. 2004. Pememfaatan Citra Landsat ETM/7 dan Sistem Informasi Geografis SIG untuk Mengamat Proses Perubahan Pantai Di Muara Sungai Randangan, Kecamatan Marisa, Provinsi Gorontalo. Skripsi.

- Putra, M. (2019). Akses Pendidikan di Daerah Pesisir. Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga.
- Sihombing, A. (2019). Ketergantungan Ekonomi Masyarakat Pesisir pada Perikanan. Medan: Penerbit Universitas Sumatera Utara.
- _____. (2020). Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Pesisir. Medan: Penerbit Universitas Sumatera Utara.
- Sumarto, S. (2018). Kebijakan Pembangunan Pesisir di Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Taufik, H. (2017). Peran Sektor Perikanan dalam Ekonomi Lokal. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Yusuf, A. (2019). Pentingnya Infrastruktur Dasar di Wilayah Pesisir. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.